



## Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan : Evaluasi Dari Berbagai Penelitian

Gracenda Febina Br Purba<sup>1</sup>, Dicky M.C. Sinulingga<sup>2</sup>, Josua Togatorop<sup>3</sup>  
Lokot Muda Harahap<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps.V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Email : [gracendafebina25@gmail.com](mailto:gracendafebina25@gmail.com), [lokotmuda14@gmail.com](mailto:lokotmuda14@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the impact of social assistance programs on poverty reduction in Indonesia, evaluate the effectiveness of non-cash social assistance distribution mechanisms, and identify obstacles and challenges in implementing the program to provide recommendations for improving its effectiveness. This study uses a literature study method by analyzing various relevant, trusted journals and theses published in the last five years. The results of the study show that social assistance helps increase purchasing power and access to basic services, but still faces obstacles such as inaccurate targeting, lack of transparency, and dependency of beneficiaries. In addition, weak coordination and inconsistent policy changes also hamper the effectiveness of the program. Improvements are needed in the data collection system, increased transparency, and integration of social assistance with economic empowerment programs so that recipients are more independent. With a better strategy, this program can be more effective in alleviating poverty and improving community welfare in a sustainable manner.*

**Keywords:** *Social Assistance, Poverty, Evaluation*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program bantuan sosial terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, mengevaluasi efektivitas mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi program tersebut untuk memberikan rekomendasi peningkatan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai jurnal dan skripsi terpercaya yang relevan, yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial membantu meningkatkan daya beli dan akses layanan dasar, tetapi masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta ketergantungan penerima manfaat. Selain itu, lemahnya koordinasi dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten turut menghambat efektivitas program. Diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, peningkatan transparansi, serta integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima lebih mandiri. Dengan strategi yang lebih baik, program ini dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, Kemiskinan, Evaluasi

### 1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah sosial utama di Indonesia, yang ditandai dengan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2021). Faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi penyebab utama kemiskinan (Suharto, 2017). Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bantuan sosial merupakan intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kementerian Sosial RI, 2020). Beberapa

program utama yang diterapkan di Indonesia antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). PKH bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan (Salsabila et al., 2024).

BPNT membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan melalui bantuan kartu elektronik yang digunakan di e-warong. Selain meningkatkan ketahanan pangan, program ini juga mendorong inklusi keuangan masyarakat miskin (Samputra & Ramadhani, 2019). JKN-PBI memastikan masyarakat miskin memiliki akses layanan kesehatan tanpa membayar langsung di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Dengan adanya program ini, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat lebih terjangkau.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial berperan dalam mengurangi kemiskinan. Studi Bappenas (2016) menyebutkan bahwa PKH telah membantu sekitar 400.000 keluarga miskin menjadi lebih mandiri hingga tahun 2015. Data BPS tahun 2016 juga menunjukkan bahwa rasio gini—indikator ketimpangan ekonomi—menurun dari 0,41 menjadi 0,40, mengindikasikan kontribusi bantuan sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi (Bappenas, 2016).

Namun, implementasi bantuan sosial masih menghadapi tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Banyak individu yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan terabaikan (Suharto, 2017). Kesalahan dalam pendataan sosial menjadi faktor utama dalam distribusi yang kurang optimal. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menjadi masalah, di mana sebagian penerima manfaat cenderung mengandalkan bantuan daripada berusaha meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (Syata, 2024).

Kurangnya transparansi dalam distribusi bantuan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan dan korupsi dalam penyaluran bantuan, yang mengurangi efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan (Salsabila et al., 2024). Oleh karena itu, pengawasan ketat serta pemanfaatan teknologi dalam pendistribusian bantuan sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program bantuan sosial terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia, mengevaluasi efektivitas mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi

program bantuan sosial serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Bantuan Sosial**

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 mengemukakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial selain dalam bentuk uang/barang saat ini juga sering dalam bentuk transfer. Sifat dukungan biasanya ditawarkan dengan atau tanpa syarat.

Bantuan Sosial biasanya dikategorikan menjadi empat jenis. Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin yang diberikan secara kelembagaan. Kedua, bantuan keuangan berupa uang tunai untuk menutupi biaya hidup dan kebutuhan lainnya. Ketiga, subsidi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat bencana alam, subsidi biasanya bersifat semetara saja. Keempat, kompensasi kebijakan pemerintah seperti subsidi BBM dan bantuan kepada korban yang mengalami pengusuran guna kebijakan relokasi.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut (Suparlan, 1995) kemiskinan adalah suatu standar hidup rendah, yaitu kekurangan yang dialami masyarakat baik dalam hal materi. Standar kehidupan ini berpengaruh dalam bidang Kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai masyarakat miskin.

(Jamasi, 2004) menjelaskan ada 4 bentuk kemiskinan. Adapun empat bentuk tersebut antara lain. Pertama, kemiskinan struktural yang disebabkan oleh sebuah situasi dan kondisi dipengaruhi oleh program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, kemiskinan bisa dikatakan absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah "garis kemiskinan" atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kemiskinan relatif diartikan saat situasi dan kondisi individu tersebut telah bekerja namun pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan. Terlebih pendapatan tersebut relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Terakhir, kemiskinan kultural yang lebih mengarah pada persoalan sikap seseorang atau

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha bekerja untuk membenahi tingkat kehidupan dan didukung dengan budaya hedonism.

Pemerintah tentunya selalu mengupayakan untuk menghilangkan kemiskinan, atau setidaknya mengurangi jumlahnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Menurut (Arfiani, 2009) beberapa penyebab kemiskinan antara lain ialah sebagai berikut:

- Penyebab patologis atau dari dalam diri sendiri, kemiskinan biasa dilihat sebagai akibat kebiasaan manusia yang berasal dari karakter, sikap, atau kemampuan dari yang miskin.
- Penyebab keluarga, yang menyampaikan adanya hubungan pendidikan keluarga terhadap kemiskinan.
- Penyebab sub-budaya, yang menggambarkan hubungan kemiskinan dengan gaya kehidupan sehari-hari yang dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- Penyebab kelembagaan, kemiskinan dinilai berasal dari hasil program atau kebijaksanaan yang dibuat orang lain seperti perang, pemerintah, dan instansi ekonomi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai jurnal dan skripsi terpercaya yang relevan, yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitasnya, dengan mempertimbangkan aspek keandalan, relevansi, dan kontribusi terhadap kajian terkait program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Data yang dikumpulkan mencakup hasil penelitian terdahulu yang mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial, tantangan dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan dalam hasil penelitian yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif guna menggambarkan secara komprehensif peran bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program bantuan sosial merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui berbagai skema seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan langsung tunai, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, efektivitas program ini masih menjadi perdebatan karena adanya berbagai tantangan

dalam implementasi. Evaluasi dari berbagai penelitian diperlukan untuk memahami sejauh mana bantuan sosial mampu mengurangi kemiskinan, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan agar program ini lebih optimal.

- **Efektivitas Bantuan Sosial dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial**  
Program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT telah membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik (Anwar, 2024). Bantuan ini tidak hanya meningkatkan daya beli penerima manfaat tetapi juga memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (Rahmadhani, 2023). Selain itu, bantuan sosial berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial antara kelompok miskin dan non-miskin, asalkan distribusi dilakukan secara merata dan transparan (Suharto, 2024).
- **Dampak Ekonomi Bantuan Sosial: Konsumsi dan Pemberdayaan**  
Bantuan sosial memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga serta perekonomian lokal (Firmansyah, 2024). Beberapa penerima bahkan berhasil memanfaatkan bantuan sebagai modal usaha kecil, meskipun sebagian besar masih menggunakannya untuk konsumsi harian (Ramadhan, 2023). Namun, agar manfaat jangka panjang lebih optimal, bantuan sosial harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha (Wijaya, 2023).
- **Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial dan Kurangnya Transparansi**  
Meski memberikan manfaat besar, program bantuan sosial juga menciptakan tantangan tersendiri. Beberapa penerima mengalami ketergantungan terhadap bantuan dan kurang berupaya untuk mandiri secara ekonomi (Amelia, 2022). Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan membuka peluang bagi penyimpangan dan korupsi, yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat (Ridha Fitri Amelia, 2022).
- **Hambatan dalam Implementasi dan Ketidaktepatan Sasaran**  
Salah satu permasalahan utama dalam implementasi bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat (Batubara, 2023). Banyak individu yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetap menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan (Lestari, 2024). Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kurangnya infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan secara merata (Nata & Riani, 2024).
- **Perubahan Kebijakan yang Tidak Konsisten dan Evaluasi Keberlanjutan**  
Yumna et al. (2024) mencatat bahwa perubahan kebijakan yang sering terjadi dalam program bantuan sosial menciptakan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Ketidakjelasan

mengenai kriteria penerima dan mekanisme distribusi sering kali membingungkan masyarakat serta memperlambat efektivitas program. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas bantuan sosial sangat diperlukan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan dan menghindari siklus ketergantungan (Sari, 2024).

## **Pembahasan**

Program bantuan sosial memiliki peran krusial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini tidak hanya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan modal usaha. Program seperti PKH dan BPNT telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya beli penerima manfaat serta mengurangi ketimpangan sosial. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas bantuan sosial dalam jangka panjang. Ketidaktepatan sasaran merupakan salah satu masalah utama dalam implementasi program ini. Banyak penerima yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetap mendapatkan bantuan, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan sering kali terlewatkan. Kesalahan dalam pendataan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, proses penyaluran bantuan sosial masih rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan akibat kurangnya transparansi dalam sistem distribusi. Hal ini mengakibatkan banyak kasus di mana bantuan tidak sampai ke penerima manfaat secara adil.

Ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menjadi tantangan yang cukup besar. Beberapa penerima manfaat lebih memilih mengandalkan bantuan daripada berusaha mencari solusi ekonomi mandiri. Hal ini menghambat upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam distribusi bantuan masih tergolong lemah, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas. Seringnya perubahan kebijakan dalam program bantuan sosial juga menciptakan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit mengakses bantuan secara konsisten dan mengatur keuangan mereka dengan baik.

Untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, pemerintah harus memperbarui dan memverifikasi data penerima manfaat secara berkala agar bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Sistem data yang lebih terintegrasi dan berbasis digital dapat membantu memastikan akurasi dan transparansi. Kedua, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti keterlibatan lembaga independen dan partisipasi masyarakat dalam memantau distribusi bantuan. Ketiga, bantuan sosial harus dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan dan akses

modal usaha agar penerima manfaat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Keempat, sistem komunikasi dan distribusi bantuan harus diperkuat agar distribusi dapat dilakukan secara efektif, terutama di daerah terpencil. Kelima, regulasi mengenai bantuan sosial perlu lebih stabil dan terencana dengan baik agar penerima manfaat tidak mengalami ketidakpastian dalam mengakses bantuan.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta membantu masyarakat miskin mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan. Selain memberikan manfaat jangka pendek, bantuan sosial yang dikelola dengan baik juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Program bantuan sosial di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga dalam memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial telah membantu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih menjadi perdebatan karena berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Ketepatan sasaran, transparansi dalam penyaluran, serta keberlanjutan manfaat bagi penerima menjadi aspek penting yang perlu terus dievaluasi.

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran, di mana masih banyak individu yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Kesalahan dalam pendataan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan distribusi bantuan tidak berjalan optimal. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menjadi tantangan besar, di mana sebagian penerima manfaat cenderung mengandalkan bantuan daripada berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ditambah lagi,

kurangnya transparansi dalam distribusi bantuan sering kali menimbulkan penyalahgunaan, seperti praktik korupsi yang menyebabkan bantuan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga turut menghambat efektivitas program ini, terutama di daerah terpencil yang memiliki infrastruktur terbatas.

Untuk memastikan efektivitas jangka panjang program bantuan sosial, diperlukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek. Pemerintah harus melakukan pembaruan dan verifikasi data penerima manfaat secara berkala agar bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan dengan melibatkan lembaga independen serta partisipasi masyarakat dalam memantau distribusi bantuan. Selain itu, program bantuan sosial sebaiknya tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat dapat lebih mandiri. Dengan strategi yang lebih terarah dan transparan, program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

### **Saran**

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan mengenai program bantuan sosial, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran, meningkatkan transparansi serta pengawasan dalam penyaluran bantuan dengan memanfaatkan teknologi digital dan melibatkan lembaga independen, serta mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat dapat lebih mandiri. Selain itu, stabilitas kebijakan bantuan sosial perlu dijaga agar penerima tidak mengalami ketidakpastian dalam menerima bantuan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan distribusi bantuan yang lebih efektif, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan sosial sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi, bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek, serta berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan jika terjadi penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial. Selain itu, masyarakat juga perlu mengembangkan keterampilan melalui program pelatihan yang tersedia agar tidak bergantung pada bantuan dalam jangka panjang, serta bersama-sama mendukung inisiatif pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan menjaga kejujuran dalam penerimaan bantuan dan memastikan hanya yang benar-benar membutuhkan yang mendapat manfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. F. (2022). *Dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anwar, A. (2024). Efektivitas bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial dan Ekonomi*, 12(1), 21-35. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). *Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pemetaan kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Batubara, R. A. (2023). *Analisis pengaruh bantuan sosial pemerintah terhadap kemiskinan* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Firmansyah, H. (2024). Pengaruh bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(3), 90-105. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI)*. Kemenkes RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial RI.
- Lestari, S. (2024). Evaluasi kebijakan bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(4), 120-135. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Nata, A. A. L., & Riani, N. (2024). *Efek bantuan sosial dalam membantu kemakmuran masyarakat kurang mampu pada Desa Ulak Rengas, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara* (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu.
- Rahmadhani, N. I. (2023). *Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara* (Skripsi). Universitas Mulawarman.
- Ramadhan, D. (2023). Hambatan dalam implementasi bantuan sosial di daerah terpencil. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(2), 55-70. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Ridha, F. A. (2022). *Dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Paninggilan Utara* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Samputra, P. L., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektivitas bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di tengah perlambatan ekonomi Indonesia dengan pendekatan non-parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 9-31. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])

- Sari, N. (2024). Bantuan sosial dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 78-93. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Suharto, E. (2017). *Pembangunan sosial dan kebijakan sosial di Indonesia*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2024). Implementasi bantuan sosial dalam pengurangan kemiskinan di Desa Banjarnendo. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 45-60. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Syata, W. M. (2024). Efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 554-559. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Wijaya, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengurangan ketergantungan pada bantuan sosial. *Jurnal Ekonomi Masyarakat*, 11(1), 33-47. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Yumna, D. R. U., Ayu, R. S., Dewi, A., Putri, N. F., & Ridwan. (2024). *Analisis kebijakan Program Keluarga Harapan dalam memutus kemiskinan di Indonesia* (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.